

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Inbox



Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>

Feb 23, 2022,
9:23 AM

to me

Yth. Sdr ADI NUGROHO

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	ADI NUGROHO
Jabatan	:	KEPALA BIDANG - BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL - DINAS
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



**IKHTISAR LHKPN a.n ADI NUGROHO
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2021)
NIK 3323030103650001**

1. DATA PRIBADI

Nama : ADI NUGROHO
NIK : 3323030103650001
No KK : 3323031712051863
NPWP : 07.827.095.6.533.000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG/1 Maret 1965
Status Nikah : Menikah
Agama : ISLAM
Alamat : KAUMAN NO. 14 RT. 03/01 KEL. TEMANGGUNG II KEC. TEMANGGUNG KAB. TEMANGGUNG PROV. JAWA TENGAH, TEMANGGUNG,
TEMANGGUNG, JAWA TENGAH
Nomor Handphone : 081548090450
Email : adinugroho1865@gmail.com
NHK : 760347
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Jabatan : KEPALA BIDANG - BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL - DINAS SOSIAL
Tanggal Laporan : 31 Desember 2021
Tanggal Kirim : 23 Februari 2022
Status : Proses Verifikasi



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	LILIK NUR SAKTI, SKM, MM	ISTRI	TEMANGGUNG , 1 Oktober 1966 / PEREMPUAN	PNS	KAUMAN NO. 14 RT. 03/01 KEL. TEMANGGUNG II KEC. TEMANGGUNG KAB. TEMANGGUNG PROV. JAWA TENGAH, Kelurahan KELURAHAN TEMANGGUNG II, Kecamatan TEMANGGUNG, Kabupaten/Kota TEMANGGUNG, Provinsi JAWA TENGAH

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KEPALA BIDANG	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	DINAS SOSIAL	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA VARIO	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	TETAP



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	Model : SEPEDA MOTOR Tahun Pembuatan : 2019 No. Pol. / Registrasi : AA 5253 FY	Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: TIDAK DIGUNAKAN SENDIRI & TIDAK MENGHASILKAN Lainnya: - Tahun Perolehan: 2019			
2	Jenis : MOBIL Merk : TOYOTA Model : MOBIL BOX Tahun Pembuatan : 2007 No. Pol. / Registrasi : AA 1853 TY	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: TIDAK DIGUNAKAN SENDIRI & MENGHASILKAN Lainnya: - Tahun Perolehan: 2017	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	TETAP
3	Jenis : MOTOR Merk : SUZUKI THUNDER Model : SEPEDA MOTOR Tahun Pembuatan : 2008 No. Pol. / Registrasi : AA 2151 KE	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	TETAP
Sub Total				Rp. 54.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.4. SURAT BERHARGA



NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
Sub Total				Rp. 0	Rp. 0

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 85.085.908	Rp. 67.566.200



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 85.085.908	Rp. 67.566.200

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0



5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 120.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 15.000.000
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 5.000.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 0



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
	Sub Total	Rp. 140.000.000

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

**7. LAMPIRAN FASILITAS**

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 54.000.000	Rp. 0	Rp. 54.000.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.